

<b>Name of Media</b>	: Suara Pembaruan Daily Newspaper, Indonesia
<b>Date of Article</b>	: 24 November 2005
<b>Author</b>	: -
<b>Pages</b>	: 4 (2 pgs original and 2 pgs translation by ASEF)
<b>Notes</b>	: Article on Asia-Europe Environment Forum 2005

# Pengelolaan Lingkungan Dikalalahkan Kepentingan Ekonomi

JAKARTA - Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim menyatakan pengelolaan lingkungan di Indonesia hingga saat ini masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan di sektor ekonomi. "Negara kita masih dalam kondisi rawan anggaran, sehingga akhirnya yang dipikirkan adalah menambah modal tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Selama uang yang dihasilkan lebih banyak maka lingkungan akan terus kalah," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/11).

Namun, menurut Emil, meskipun dalam kondisi krisis, pemerintah seharusnya berkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya alam yang strategis, seperti air dan tanah. Sumber daya ini penting sekali untuk dijaga karena menjadi kebutuhan vital bagi setiap orang.

Selama ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk menjaga kondisi air dan tanah tidak pernah dilaksanakan dengan baik. "Banyak peraturan dan undang-undang yang sudah dibuat, tapi hasilnya tak terlihat karena peraturan-peraturan itu tidak pernah dilaksanakan dengan baik. Laksanakan peraturan dulu, baru memperbaiki peraturan itu, jika ada kekurangan. Jangan belum-dilaksanakan sudah ingin diubah," ujarnya.

Emil juga mengkritik pelaku-pelaku ekonomi yang tidak pernah memperhitungkan biaya lingkungan. "Mereka selalu menyebutkan peningkatan pertumbuhan, peningkatan hasil, tapi apakah

peningkatan hasil itu sudah memperhitungkan *environmental lost* yang seharusnya mereka keluarkan? Sudah saatnya ada mekanisme menghitung kerugian lingkungan," tegasnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengkhawatirkan dampak tekanan lingkungan global terhadap pertumbuhan negara. Ia mencontohkan dampak perubahan iklim dan pemanasan global terhadap pertanian Indonesia. Pertanian akan terganggu dengan perubahan iklim dan ketersediaan air jika tidak ada antisipasi degradasi lingkungan. Padahal pertanian merupakan tonggak utama dalam menjaga ketahanan pangan. "Saya sangat *concern* dengan masalah air. Saat ini mungkin belum menjadi isu yang penting, tetapi 20 tahun ke depan air ini akan menjadi isu penting," ujarnya.

## Konsolidasi

Sementara itu, negara-negara selatan melakukan konsolidasi untuk memperkuat kemitraan dalam program pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menyusun mekanisme saling membantu di antara negara-negara selatan.

Konsolidasi itu juga dilakukan untuk menjembatani hubungan negara donor, sehingga negara-negara selatan yang distereotipkan sebagai negara berkembang, tidak selamanya bergantung pada negara donor.

Penyusunan mekanisme itu dilakukan dalam pertemuan



DOK PEMBARUAN

EMIL SALIM

an United Nations for Environmental Programme (UNEP) Governing Council, di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari sejak Rabu (23/11), dihadiri 25 perwakilan negara-negara selatan setingkat menteri dan Indonesia diwakili oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman.

Presiden UNEP Rachmat Witoelar menyatakan pertemuan ini merupakan konsolidasi untuk membuat kerangka bersama dalam pemberdayaan dan alih teknologi di masing-masing negara sesuai dengan kesepakatan 112 negara anggota UNEP dalam pertemuan *Bali Strategic Plan for Technology Support and Capacity Building* tahun 2004.

Rahmat yang juga menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup RI menjelaskan selama ini ada persepsi negara-negara selatan hanya menunggu

bantuan dari negara donor, padahal sebenarnya di antara negara-negara selatan bisa saling bantu.

"Meskipun masih negara berkembang, kami menciptakan upaya saling bantu kepada negara lain yang sama kondisinya, seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara di Afrika. Sederhananya, setiap negara wajib memberikan iuran untuk disumbangkan ke negara yang membutuhkan," ujarnya.

Bentuk bantuan yang dilakukannya oleh sesama negara berkembang ini cenderung bersifat tanpa pamrih, berbeda dengan kebiasaan bantuan donor lainnya yang mensyaratkan suatu hal pada negara penerima.

Namun menurut Rachmat pertemuan ini bukan untuk mempertajam friksi antara negara berkembang dengan negara maju. "UNEP tidak pernah melakukan konsolidasi untuk membentuk kontroversi. Kami ingin membangun jembatan emas antara negara-negara selatan dan negara maju. Hasil pertemuan ini nantinya akan menjadi agenda pertemuan UNEP di Dubai Februari 2006 mendatang," jelasnya.

#### **Forum Lingkungan**

Selain pertemuan UNEP, Jakarta juga menjadi tuan rumah acara Konferensi Forum Lingkungan Asia-Eropa yang berlangsung hingga Jumat (25/11) nanti. Konferensi ini dihadiri 300 peserta perwakilan dan ahli dari negara-negara Asia-Eropa.

Dalam forum lingkungan se-Asia-Eropa ini dibahas tentang meningkatnya tekanan terhadap kondisi lingkungan secara global oleh pertumbuhan sosial ekonomi, baik dalam cakupan negara, regional, maupun global.

Hal ini membutuhkan penanganan bersama dari seluruh negara karena dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan satu negara tidak hanya dirasakan oleh negara itu saja. Hal ini menjadikan pentingnya kemitraan antara negara dan kawasan dalam posisi yang sejajar dan saling menguntungkan.

Direktur Intellectual Exchange Asia-Europe Foundation dan Koordinator Forum Lingkungan Asia-Eropa Bertrand Fort menyebutkan pertemuan ini akan menumbuhkan semangat untuk mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan pada masing-masing negara Asia-Eropa. Semangat ini akan menggerakkan masyarakat sipil mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah masing-masing negara dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Masalah-masalah lingkungan global, seperti perubahan iklim dan pemanasan global, tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Semua negara memiliki kewajiban meminimalisasi efek pemanasan global itu, sehingga kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti *Clean Development Mechanism* (CDM), perlu segera diaplikasikan di masing-masing negara. (K-11)

## Environment management loses out to economical interest

**Jakarta** – Former State Minister for the Environment of Indonesia, Emil Salim, stated that environment management in Indonesia is still losing out to many interests in economics sector. “The economy is still in a critical stage, that we are always trying to increase our capital without considering the impacts to environment. As long as high financial returns rule, the environment will always be the loser,” he said in Jakarta, Wednesday (23/11).

Emil further said, the government should concentrate on strategic natural resource management, like water and land. These resources are important due to their vitalness to every person.

So far, policies on the usage of water and land have never been fully implemented. “So many rules and regulations have been produced, but we hardly see any impact, since these rules and regulations have never been well actuated. They (the government) should implement the regulations first, and then make the necessary improvements, instead of regularly changing the yet-to-be implemented regulations,” he said.

Emil also criticised economy actors who never made accountable for economical costs. “They always refer to growths and results, but the question is whether they have considered the resulted *environmental losses* on such growths and results. The time has come for the implementation of mechanisms to calculate environmental losses,” he emphasised.

He is also worried of the impact of global environmental pressure on national growth. He took an example of climate change and global warming, which have affected Indonesia’s agriculture. With agriculture as a crucial factor in food logistics, food supply will be disrupted due to the climate shift and water reserve. “I am very concerned with water problems. While it is not a big deal today, it will be in the next 20 years,” he said.

### Consolidation

Meanwhile, southern countries consolidated their strengths in sustainable development partnerships, especially in building a mechanism to support one another.

The consolidation was also done by bridging relationship to donor countries, with the purpose to eventually create independency among these developing countries.

This effort was expressed in United Nations for Environmental Programme (UNEP) Governing Council meeting in Jakarta. Twenty-five representatives from southern countries attended this two-day, ministerial-level meeting. Indonesia was represented by State Minister for the Research and Technology, Kusmayanto Kadiman.

UNEP’s president Rachmat Witoelar said this meeting is an effort to create a framework of technology usage and transfers, as agreed by 112 UNEP’s members during *Bali Strategic Plan for Technology Support and Capacity Building* held in 2004.

Rachmat who was also the incumbent Indonesian State Minister for the Environment explained that while there is a misperception that southern countries only wait for the donors’ help, each of these southern countries actually has ability to help one another.

“Although we are still in developing stage, southern countries should be able to give support to countries in similar stages, just like our counterparts in Africa. In short, one country should assist others with no strings attached,” he said.

## Translation

However, continued Rachmat, the meeting is not meant to create frictions between developing and developed countries. “UNEP does not intend to spark controversy. We want to build a ‘golden gate’ between developing and developed countries. The results of this meeting will be the agenda of the next UNEP meeting in Dubai in February 2006,” he said.

### Environmental Forum

Besides the UNEP meeting, Jakarta also hosted the Asia-Europe Environment Forum, which will be held until Friday (25/11). Three hundreds representatives and experts from Asia and Europe are attending this meeting.

This meeting will talk about the pressure to environmental conditions due to national, regional and global economic and social growth. Such thing requires counter-efforts from all countries, as damage done by one country will affect others. This makes equal partnerships among countries become important.

Director of Intellectual Exchange of the **Asia-Europe Foundation**, and the co-ordinator for Asia-Europe Environment Forum, Bertrand Fort, said this meeting would cultivate the spirit of sustainable natural resource management in every Asian and European country. This spirit would be a driving force for civil societies to affect government policies that fall within the framework of sustainable development.

Global environmental issues like climate change and global warming cannot be solved by individual countries. All nations share the responsibility to reduce their impacts by immediately implementing international agreements, like *Clean Development Mechanisms (CDM)*, among others. (K-11)

*[end]*